

**LAPORAN AKHIR**  
**MAGANG & STUDI INDEPENDEN BERSERTIFIKAT**

**ASSISTANT TO MEMBER PARLIAMENT (MP)'S  
EXPERT STAFF**

**MAGANG**  
**DI SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI**

Sabrina Tria Damayanti  
102011133182



**PRODI FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT**  
**UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**2023**

**LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN AKHIR MSIB  
MAGANG DI RUMAH RAKYAT (MDRR) DPR RI**

Disusun Oleh:  
Sabrina Tria Damayanti  
102011133182

Telah disahkan dan diterima dengan baik oleh

Dosen Pembibing Magang MSIB  
Departemen Administrasi dan Kebijakan  
Kesehatan



Inge Dhamanti, S.KM., M.Kes., M.PH., PH.D  
NIP 19801224005012002

Pembibing Magang MSIB  
Komisi IX Sekretariat Jenderal DPR RI



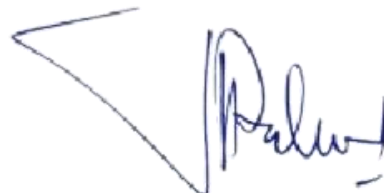
Ida Nuryati, S. Sos., M.A.  
NIP 197604011998032002

Koordinator Program Studi Kesehatan  
Masyarakat S-1



Dr. Muji Sulistyowati, S.KM, M.Kes  
NIP 197311151999032002

Ketua Departemen  
Administrasi dan Kebijakan Kesehatan



Prof. Dr. Ratna Dwi Wulandari, S.KM., M.Kes  
NIP 197510181999032002

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikannya **“Laporan Akhir Magang di Rumah Rakyat (MDRR) Komisi IX DPR RI”**, sebagai salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan magang di Sekretariat Jenderal DPR RI dengan baik.

Dalam penyusunan dan penulisan laporan magang MDRR DPR ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Selain itu, dengan senang hati saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Dr. Santi Martini dr., M.Kes, selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga.
2. Dr. Muji Sulistyowati, S.KM., M.Kes selaku Koordinator Program Studi Fakultas Kesehatan Masyarakat.
3. Prof. Dr. Ratna Wulandari, S.KM., M.Kes selaku Ketua Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga.
4. Inge Dhamanti, S.KM., M.Kes., M.PH., PH.D selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Ida Nuryati, S.Sos., M.A. dan Aprilia Dessy Kurniaty, S.E. selaku Mentor serta Deny S.H., MH dan Achmad Zamzami, S.E., MM selaku Co-Mentor yang telah membimbing dan memberikan arahan selama magang di MDRR Komisi IX DPR RI.
6. Teman-teman *mentee* Komisi IX DPR RI tersayang, yaitu Rana Ratri, Enny Erawati, Novita Agustina, Hany Mei Liana, Rana Syahla, Humairah, Perdianus, dan Amin dalam setiap kebersamaan dan dukungan selama kegiatan magang dilaksanakan.
7. Ayah, Ibu, dan saudara saya tercinta yang telah memberikan kepercayaan, dukungan, dan do'a selama kegiatan magang dilaksanakan.

Semoga Allah SWT memberikan balasan pahala atas segala amal yang telah diberikan dan semoga laporan akhir ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun pihak lain yang membutuhkan.

Surabaya, 9 Januari 2024

Penulis

**DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I LATAR BELAKANG .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.....	3
1.2.1 Tujuan Umum .....	3
1.2.2 Tujuan Khusus .....	3
1.3 Manfaat.....	4
1.3.1 Manfaat Bagi Mahasiswa.....	4
1.3.2 Manfaat Bagi Perguruan Tinggi .....	4
1.3.3 Manfaat Bagi Instansi .....	4
1.4 Deskripsi Kegiatan Magang .....	5
1.5 Waktu, Pelaksanaan, dan Penempatan Magang .....	6
1.6 Jadwal Pelaksanaan Magang .....	6
<b>BAB II GAMBARAN UMUM .....</b>	<b>8</b>
2.1 Profil Instansi.....	8
2.1.1 DPR RI.....	8
2.1.2 Sekretariat Jenderal DPR RI .....	10
2.1.3 Komisi IX DPR RI.....	11
2.1.4 Tenaga Ahli Komisi IX DPR RI.....	13
<b>BAB III AKTIVITAS MINGGUAN .....</b>	<b>14</b>
<b>BAB IV CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH.....</b>	<b>27</b>
4.1 Deskripsi .....	27
4.2 Hasil Pembelajaran Dalam Rangka Pencapaian <i>Learning Outcome</i> Mata Kuliah.....	28
4.2.1 Analisis Kebijakan Kesehatan .....	28
4.2.2 Manajemen Strategis di Bidang Kesehatan .....	31
4.2.3 Pemasaran Jasa Bidang Kesehatan .....	36
4.2.4. Sistem Informasi Manajemen Kesehatan dan Rumah Sakit .....	37

4.2.5 Asuransi Kesehatan.....	39
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>42</b>
5.1 Kesimpulan.....	42
5.2 Saran.....	43
5.2.1 Bagi Mahasiswa.....	43
5.2.2 Bagi Instansi Sekretariat Jenderal DPR RI.....	43
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>44</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>45</b>

**DAFTAR TABEL**

Nomor	Judul Tabel	Halaman
1.1	Jadwal Pelaksanaan Magang.....	6
2.1	Struktur Komisi IX DPR RI.....	11
3.1	Aktivitas Mingguan Magang di Rumah Rakyat (MDRR) DPR RI.....	15

**DAFTAR LAMPIRAN**

Nomor	Judul Lampiran	Halaman
1	Letter of Acceptance (LoA).....	46
2	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan MDRR DPR RI.....	48
3	Sertifikat MSIB MDRR DPR RI.....	51



## **BAB I**

### **LATAR BELAKANG**

#### **1.1 Latar Belakang**

Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah program inisiatif Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang diluncurkan untuk mentransformasi sistem Pendidikan tinggi di Indonesia untuk menghasilkan lulusan yang lebih relevan. Kampus Merdeka memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar program studi selama 1 semester dan berkegiatan di luar perguruan tinggi selama 2 semester. MBKM dijalankan melalui 4 pilar kebijakan, yakni pembukaan program studi baru, sistem akreditasi perguruan tinggi, perguruan tinggi berbadan hukum, dan hak belajar di luar program studi. Program Kampus Merdeka memiliki berbagai macam program yaitu, 1) Magang Bersertifikat, 2) Studi Independen, 3) Kampus Mengajar, 4) Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA), 5) Pertukaran Mahasiswa Merdeka, 6) Membangun Desa (KKN Tematik), 7) Proyek Kemanusiaan; 8) Riset atau Penelitian, dan 9) Wirausaha.

Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) merupakan program kesiapan karir yang komprehensif dan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar di luar program studi dengan jaminan konversi SKS yang diakui perguruan tinggi. Kebijakan MSIB sesuai dengan Permendikbud Pasal 18 Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan: 1) mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar; dan 2) mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi.

Peran instansi pemerintah dan pendidikan berpengaruh terhadap perkembangan dan pertumbuhan bangsa. Dengan adanya integrasi dan hubungan yang erat antara instansi pemerintah dan pendidikan, sebuah negara dapat mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan

kualitas sumber daya manusia, dan menciptakan masyarakat yang terdidik dan berdaya saing dalam skala global. Dengan demikian, pentingnya kesinambungan dan kerjasama antara instansi pemerintah dengan institusi pendidikan agar dapat terciptanya tujuan pertumbuhan dan perkembangan bangsa yang inklusif. Dalam rangka implementasi program MSIB, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kemendikbud, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga mendorong mahasiswa untuk dapat ikut serta menjalankan dan memanfaatkan program dengan baik. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk terjun dan terlibat aktif dalam berbagai kegiatan positif yang dapat meningkatkan produktivitas serta peningkatan kompetensi dan keterampilan dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Melalui program MSIB, mahasiswa dapat mengintegrasikan pengetahuan yang telah diperoleh selama mengikuti program studi dengan realitas di lapangan.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI adalah lembaga legislatif negara yang memiliki peran sentral dalam membahas dan mengesahkan undang-undang serta mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah. Magang di Rumah Rakyat (MDRR) DPR RI adalah program magang yang dirancang untuk memberikan pemahaman praktis kepada mahasiswa tentang proses legislasi, tugas, dan tanggung jawab anggota DPR, serta isu-isu yang sedang dibahas dalam konteks pelayanan masyarakat. Magang di Rumah Rakyat (MDRR) DPR RI merupakan program magang yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa Indonesia melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Peserta magang akan mempelajari pelaksanaan ketiga fungsi DPR RI dan Diplomasi Parlemen melalui keterlibatan pada rangkaian proses tugas dan fungsi DPR RI secara langsung dan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai *supporting system* DPR RI yang berstatus sebagai aparatur pemerintah. MDRR DPR RI mengusung aktivitas *Parliamentary Internship Program* (Pattern Pro) yang terdiri atas 6 kerangka agenda, yaitu observasi, kuliah umum, audiensi, magang, simulasi, dan evaluasi sesuai dengan posisi yang ditempatkan sesuai dengan kebutuhan di unit kerja eselon

II. Komisi IX DPR RI merupakan salah satu dari sejumlah komisi di DPR yang memiliki tugas dan wewenang khusus dalam bidang kesejahteraan rakyat. Secara umum, Komisi IX DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan kependudukan dan memiliki peran krusial dalam membahas isu-isu yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat di Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, magang di MDRR DPR RI khususnya Komisi IX DPR RI merupakan kesempatan emas bagi mahasiswa dalam mengaplikasikan ilmu kesehatan masyarakat dalam bidang administrasi dan kebijakan kesehatan di instansi dan unit kerja yang relevan dengan program studi.

## **1.2 Tujuan**

### **1.2.1 Tujuan Umum**

Pelaksanaan MISB bertujuan untuk memperoleh pengalaman praktis dan meningkatkan kompetensi, keterampilan, serta sikap mahasiswa S1 Kesehatan Masyarakat peminatan Administrasi dan Kebijakan Kesehatan di dunia kerja. Melalui program magang MSIB ini, mahasiswa dapat mengintegrasikan ilmu dan pengetahuan yang diperoleh di bangku perkuliahan dan mengaplikasikannya secara nyata di instansi Sekretariat Jenderal Komisi IX DPR RI.

### **1.2.2 Tujuan Khusus**

1. Mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan Magang di Rumah Rakyat (MDRR) Sekretariat Jenderal Komisi IX DPR RI.
2. Mempelajari struktur organisasi, peran, fungsi, dan tanggung jawab DPR RI dan Sekretariat Jenderal Komisi IX DPR RI.
3. Memahami dan berperan secara profesional sebagai asisten Tenaga Ahli Komisi IX DPR RI.
4. Mengembangkan keterampilan kerja dan komunikasi bersama tim Sekretariat Jenderal Komisi IX DPR RI.
5. Memenuhi capaian pembelajaran mata kuliah semester 7 melalui pelaksanaan program magang.

### **1.3 Manfaat**

#### **1.3.1 Manfaat Bagi Mahasiswa**

1. Mahasiswa dapat memahami struktur, peran, fungsi, dan tanggung jawab DPR RI dan Sekretariat Jenderal Komisi IX sebagai sistem pendukungnya
2. Mahasiswa dapat menerapkan pengetahuan teoritis yang telah dipelajari selama perkuliahan pada saat magang di Sekretariat Jenderal Komisi IX DPR RI.
3. Mahasiswa dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mengenai bidang Ilmu Administrasi dan Kebijakan Kesehatan di dunia kerja.
4. Mahasiswa dapat memahami dan berperan secara profesional sebagai asisten Tenaga Ahli Komisi IX DPR RI.
5. Mahasiswa dapat memperoleh pemahaman lebih dalam terkait masalah kesehatan yang dihadapi masyarakat dan bagaimana instansi DPR RI dan Sekretariat Jenderal Komisi IX DPR RI dalam melakukan 3 Fungsi DPR RI.

#### **1.3.2 Manfaat Bagi Perguruan Tinggi**

1. Membuka pintu kerjasama antara fakultas dengan Sekretariat Jenderal DPR RI sehingga dapat memperoleh wawasan instansi, akses ke sumber daya, dan peluang kolaborasi.
2. Dengan diselenggarakannya kegiatan ini, fakultas dapat membantu mahasiswa dalam mempersiapkan diri untuk berkarir di bidang kesehatan.

#### **1.3.3 Manfaat Bagi Instansi**

1. Menjalinkan hubungan kerjasama yang baik dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak, yaitu Sekretariat Jenderal DPR RI dengan Perguruan Tinggi Universitas Airlangga.
2. Mendapatkan bantuan sumber daya manusia yang dapat memberi kontribusi pada instansi.

### 1.3 Deskripsi Kegiatan Magang

Posisi : *Assistant to Member Parliament's Expert Staff*

Deskripsi : Magang di Rumah Rakyat (MDRR) DPR RI merupakan program magang yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa Indonesia melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Pada kegiatan magang ini, peserta berada pada posisi *Assistant to MP's Expert Staff* peserta magang menjadi asisten untuk tenaga ahli di Komisi IX DPR RI. Adapun beberapa hal yang menjadi peran dan tanggung jawab sebagai asisten tenaga ahli Komisi IX DPR RI adalah sebagai berikut.

#### 1. Penelitian dan Analisis

Membantu melakukan penelitian dan analisis terhadap isu-isu kebijakan, membantu tenaga ahli dalam menyusun informasi teknis yang dibutuhkan oleh Anggota Komisi IX DPR RI.

#### 2. Penyusunan dokumen

Mendukung dalam penyusunan dokumen-dokumen resmi, termasuk *policy brief*, laporan kegiatan, *Terms of Reference (ToR)*, dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

Dalam kegiatan Magang di Rumah Rakyat (MDRR) DPR RI mahasiswa berkesempatan untuk mengetahui secara langsung bagaimana keterlibatan manajemen sumber daya, perencanaan strategis, dan pengambilan keputusan secara holistik dengan pelibatan berbagai *key stakeholder* dalam bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan kependudukan. Hal tersebut diperoleh dari keikutsertaan mahasiswa magang dalam berbagai agenda Sekretariat Jenderal Komisi IX DPR RI yaitu Rapat Kerja (Raker), Rapat Dengar Pendapat (RDP), Rapat Panitia Kerja (Panja), hingga Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek). Di samping beberapa kegiatan tersebut, peserta MDRR DPR RI juga mengikuti berbagai agenda *Parliamentary Internship Program (Pattern Pro)* yang terdiri atas 6 kerangka agenda, yaitu observasi, kuliah umum, audiensi, magang, simulasi, dan evaluasi.

**1.4 Waktu, Pelaksanaan, dan Penempatan Magang**

Magang Studi dan Independen (MSIB) di Magang di Rumah Rakyat (MDRR) DPR RI diselenggarakan selama 4 bulan, dimulai pada tanggal 14 Agustus hingga 31 Desember 2023. Penempatan magang MDRR DPR RI penulis yaitu pada unit kerja Komisi IX DPR RI sebagai *Assistant to Mp’s Expert Staff* yang berlokasi di Jl. Gatot Subroto RT.1/RW.3, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10270.

**1.5 Jadwal Pelaksanaan Magang**

Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan Magang

Kegiatan	Agt				Sept				Okt				Nov				Des			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
<b>Pra Pelaksanaan Magang</b>																				
Persiapan dan konsultasi dengan dosen	■																			
Penyusunan rancangan proposal magang		■																		
Pemaparan proposal magang		■																		
<b>Pelaksanaan Magang</b>																				
Penerjunan, observasi, dan orientasi mahasiswa di tempat magang			■	■	■															
Kuliah umum			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Audiensi			■	■	■	■	■													
Pelaksanaan magang MDRR DPR RI untuk mencapai <i>learning outcome</i>			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Simulasi Sidang Paripurna																				
Evaluasi dan penyusunan <i>project</i> akhir																				

Kegiatan	Agt				Sept				Okt				Nov				Des			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
<b>Pasca Pelaksanaan Magang</b>																				
Penyusunan laporan magang																				
Seminar hasil magang																				

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **2.1 Profil Instansi**

##### **2.1.1 DPR RI**

###### **1. Deskripsi**

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya berasal dari partai politik peserta pemilihan umum. DPR RI memiliki tugas dan fungsi yang diatur dalam UUD tahun 1945 hasil amandemen, yaitu sebagai lembaga pembentuk undang-undang, pelaksana pengawasan terhadap pemerintah, dan fungsi anggaran.

###### **2. Fungsi, Tugas, dan Wewenang**

###### **A. Fungsi Legislasi**

Terkait dengan fungsi legislasi, DPR RI memiliki tugas dan wewenang:

- a. Menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
- b. Menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU)
- c. Menerima RUU yang diajukan oleh DPD (terkait otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan SDA dan SDE lainnya; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah)
- d. Membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD
- e. Menetapkan UU bersama dengan Presiden
- f. Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti UU (yang diajukan Presiden) untuk ditetapkan menjadi UU



## **B. Fungsi Anggaran**

Terkait dengan fungsi anggaran, DPR RI memiliki tugas dan wewenang:

- a. Memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN (yang diajukan Presiden)
- b. Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan, dan agama
- c. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK
- d. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara

## **C. Fungsi Pengawasan**

Terkait dengan fungsi anggaran, DPR RI memiliki tugas dan wewenang:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, dan kebijakan pemerintah
- b. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD (terkait pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama)

## **D. Tugas dan Wewenang DPR RI lainnya, antara lain:**

- a. Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat
- b. Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk: (1) menyatakan perang atau membuat perdamaian dengan Negara lain; (2) mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial

- c. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal: (1) pemberian amnesti dan abolisi; (2) mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar lain
- d. Memilih Anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD
- e. Memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon hakim agung yang akan ditetapkan
- f. Memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden

## **2.1.2 Sekretariat Jenderal DPR RI**

### **1. Deskripsi**

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen DPR RI) merupakan unsur penunjang DPR yang berkedudukan sebagai Kesekretariatan Lembaga. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Perpres Nomor 26 Tahun 2020 tentang Setjen DPR RI) dinyatakan bahwa Setjen DPR RI adalah aparatur pemerintah yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan DPR RI.

### **2. Tugas dan Fungsi**

Setjen DPR RI mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang persidangan, administrasi, dan keahlian. Di dalam melaksanakan tugasnya, Setjen menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan Sekretariat Jenderal
- b. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal

- c. Perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan persidangan kepada DPR RI
- d. Perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan administrasi kepada DPR RI
- e. Perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan keahlian kepada DPR RI
- f. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Sekretariat Jenderal
- g. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengolahan data dan pelayanan informasi, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional, serta dukungan tertentu pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal
- h. Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh DPR RI
- i. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi

### **2.1.3 Komisi IX DPR RI**

#### **1. Deskripsi**

Komisi merupakan salah satu Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang bersifat tetap dan jumlahnya ditetapkan pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan Tahun Sidang. Pada Kepengurusan DPR-RI Periode 2014-2019 telah ditetapkan jumlah Komisi sebanyak 11 (sebelas) Komisi. Hal ini berdasarkan Keputusan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 16 Oktober 2014. Salah satu Komisi yang ada di DPR adalah Komisi IX. Berdasarkan Keputusan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 4 November 2014, Komisi IX DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan kependudukan.

#### **2. Mitra Kerja**

Sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi IX DPR RI sebagaimana tersebut di atas, Komisi IX DPR RI berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor: 3/DPR RI/IV/2014-2015 tentang

Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019 tanggal 23 Juni 2015, memiliki Mitra Kerja sebagai berikut:

1. Kementerian Kesehatan
2. Kementerian Ketenagakerjaan
3. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
4. Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM)
5. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan)
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan)

### 3. Struktur Komisi IX DPR RI

Tabel 2.1 Struktur Komisi IX DPR RI

Kepala Bagian	Ida Nuryati, S.Sos., M.A.
Kepala Sub Bagian Rapat	H. Ahmad Rojali, S.Sos
Staf	Asep Saifudin
Staf	Yunus Ari Triawan, S.Pd
Staf	Sri Lestari
Kepala Sub Bagian TU	Aprilia Dessy Kurniati, S.E.
Staf	Indra Gunawan
Staf	H. Zainudin
Tenaga Ahli Tenagakerja	Ariyanti, S.H.MH
Tenaga Ahli Tenagakerja	Abdul Wahab Samad, S.E., MM.
Tenaga Ahli Tenagakerja	Deny Fitriadi, S.H.
Tenaga Ahli Tenagakerja	Indra, S.H., MH
Tenaga Ahli Tenagakerja	Achmad Zamzami, S.E., MM
Tenaga Ahli Kesehatan	Latifatul Hasanah, S.Si., MPH
Tenaga Ahli Kesehatan	Deny Fitriadi, S.H, MKn
Tenaga Ahli Kesehatan	Luthandy Kurniawan Saputro
Protokol	Listrya Shintyua Debby

PPNASN	Raka Ikhsan Alwi
PPNASN	Deni Arzoni
PPNASN	Muhammad Yunus

#### **2.1.4 Tenaga Ahli Komisi IX DPR RI**

##### **1. Deskripsi**

Tenaga Ahli Komisi IX DPR RI mengacu pada anggota staf ahli yang bekerja untuk Komisi IX yang berfokus ruang lingkup Komisi IX yaitu kesehatan, ketenagakerjaan, dan kependudukan.

##### **2. Tugas dan Fungsi**

1. Penyusunan analisis kebijakan terkait sektor yang menjadi fokus Komisi IX DPR RI.
2. Memberikan masukan dan rekomendasi kepada anggota Komisi IX DPR RI.
3. Berpartisipasi dalam rapat dan sidang untuk memberikan pandangan dan perspektif ahli yang mendalam dan mendukung pengambilan keputusan Anggota Komisi IX DPR RI.
4. Pendampingan Anggota Komisi IX dan memberikan informasi dan pendalaman.
5. Penyusunan materi dan publikasi Komisi IX DPR RI.
6. Pemantauan isu kesejahteraan masyarakat.

### BAB III

#### AKTIVITAS MINGGUAN

Tabel 3.1 Aktivitas Mingguan Magang di Rumah Rakyat (MDRR) DPR RI

Minggu	Kegiatan
1	<p>Pada Minggu 1 yakni rentang waktu 14 Agustus - 18 Agustus 2023 peserta Magang di Rumah Rakyat DPR RI (MDRR) 2023 mengikuti rangkaian kegiatan <i>pra-orientasi</i> yaitu, (1) Kegiatan <i>national onboarding</i> yang serentak diikuti oleh seluruh peserta MSIB <i>batch</i> 6. Dalam kegiatan ini peserta magang memperoleh banyak bekal dan <i>insight</i> yang akan bermanfaat bagi pelaksanaan MSIB kedepannya, (2) Acara <i>welcoming speech</i> oleh Plt. Kepala Kapusbangkom Legislatif DPR RI, Asep Ahmad Saefuloh, (3) Sidang Tahunan MPR Tahun 2023 Pidato Ketua DPR RI dalam rangka Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2023-2024 dan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka Penyampaian RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangan dan Dokumen kepada Ketua DPR RI, (3) Kegiatan konsolidasi peserta yang merupakan salah satu bentuk mempererat ikatan antar peserta MDRR.</p>
2	<p>Pada Minggu ke-2 yakni rentang waktu 21 Agustus - 25 Agustus 2023 peserta Magang di Rumah Rakyat DPR RI (MDRR) 2023 mengikuti rangkaian kegiatan yaitu, (1) <i>Building Learning Commitment</i> (BLC) yang diawali dengan diskusi dalam forum yang difasilitasi oleh Pusbangkom Leislatif dengan topik kemerdekaan, Peserta mendapatkan penugasan kelompok yakni pemilihan salah satu tokoh anggota DPR beserta apa filosofi pemilihannya, (2) Menyaksikan Rapat Paripurna dengan agenda: Pandangan Umum Fraksi atas RUU tentang APBN TA 2024, (3) Mengikuti kuis seputar pengetahuan peserta mengenai pemerintahan, komunikasi</p>

Minggu	Kegiatan
	<p>parlemen, dan DPR secara umum. Hal ini merupakan salah satu bentuk pendalaman peserta terkait dengan pengetahuannya tentang DPR, (3) Rapat Paripurna dengan agenda: Pandangan Umum Fraksi atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2022, (4) Kegiatan observasi dari Bagian Hubungan Masyarakat dan Pengelolaan Museum Setjen DPR RI yang berisikan informasi mengenai tempat dan lokasi di wilayah Setjen DPR RI.</p>
3	<p>Pada Minggu ke-3 yakni rentang waktu 28 Agustus - 1 September 2023 peserta Magang di Rumah Rakyat DPR RI (MDDR) Komisi IX mengikuti rangkaian kegiatan yaitu, (1) Mobilisasi mahasiswa MDDR yang dilakukan dari daerah menuju tempat magang, (2) Kuliah Umum Biro Protokol dan Humas tentang sejarah DPR RI yang disampaikan oleh Bima Widiatiaga, S.Hum (Pranata Humas) melalui Zoom Meeting dengan topik mengenai sejarah DPR RI, (3) Agenda magang Komisi IX yang diawali dengan perkenalan dengan mentor serta peserta Komisi IX lain, (4) Rapat Kerja (Raker) Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan RI. Rapat yang membahas mengenai UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dampak polusi udara pada kesehatan, RRT: <i>lessons learned</i> pengendalian polusi, serta upaya sektor kesehatan Indonesia, (5) Audiensi Komisi IX dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang. Dalam audiensi ini disampaikan beberapa permasalahan seperti, masih belum meratanya jumlah dan besaran anggaran transportasi kader dan lokasi RS pratama. Dari hasil audiensi ini peserta diberikan tugas untuk membuat <i>policy brief</i> yang dilakukan dengan kerja kelompok yang berisikan, pendahuluan, identifikasi masalah, analisis kebijakan, dan rekomendasi kebijakan, (6) <i>Sharing</i> bersama dengan Tenaga Ahli Komisi IX yang membidangi bidang kesehatan dan ketenagakerjaan.</p>
4	<p>Pada Minggu ke-4 yakni rentang waktu 4 September - 8 September</p>

Minggu	Kegiatan
	<p>2023 peserta Magang di Rumah Rakyat DPR RI (MDRR) Komisi IX mengikuti rangkaian kegiatan magang yaitu, (1) Kuliah Umum Fungsi Legislasi yang disampaikan oleh Wakil Ketua Baleg, Achmad Baidowi yang berlangsung di Ruang Rapat KK II yang membahas tentang 3 fungsi DPR RI, khususnya fungsi legislasi, (2) Observasi - <i>Office Tour</i> yang akan dipandu oleh Biro Protokol dan Humas. Pada observasi ini peserta MDDR 2023 dipandu untuk mengelilingi gedung DPR RI seperti, Museum DPR RI dan Gedung Kura-Kura, (3) Kuliah Umum Literasi Digital yang disampaikan oleh Kepala Pustekinfo melalui <i>zoom meeting</i>. Sehubungan adanya himbauan dari Sekjen DPR RI untuk melaksanakan tugas secara WFH/WFO, khususnya selama pelaksanaan KTT ASEAN dan adanya agenda rapat Komisi IX yang dilaksanakan secara tertutup maka pelaksanaan magang dilakukan secara <i>online</i>, (4) <i>Sharing</i> bersama mentor dan <i>co-mentor</i> yang merupakan Tenaga Ahli Komisi IX mengenai DPR RI, seperti dasar hukum, lembaga negara sebelum dan setelah amandemen, Fungsi DPR, (5) Acara Kobar Lawan Dengue dimana banyak sekali tokoh-tokoh yang hadir dalam acara tersebut. Salah satunya adalah Emanuel Melkiades Laka Lena selaku anggota DPR RI Komisi IX dan Dante Saksono Harbuwono selaku Wakil Menteri Kesehatan RI.</p>
5	<p>Pada Minggu ke-5 yakni rentang waktu 11 September - 15 September 2023 peserta Magang di Rumah Rakyat DPR RI (MDRR) Komisi IX mengikuti rangkaian kegiatan yaitu, (1) Kegiatan pembukaan MDRRR <i>batch</i> 3 Nava Panca. Pembukaan diawali dengan sambutan dari Dr.Ir.Indra Iskandar, M.Si, Dr. Sri Suning Kusumawardani, S.T, M.T, dan Wakil Ketua Komisi X, Agustina Wilujeng, (2) Kuliah Umum dengan topik Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI yang disampaikan oleh</p>



Minggu	Kegiatan
	Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi yakni Dr. Helmizar, M.E, (3) Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi IX dengan Badan Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI), (4) Perkenalan dengan seluruh Pejabat dan Pegawai Sekretariat Komisi IX, dan Kuliah Singkat oleh Tenaga Ahli Komisi IX Bidang Kesehatan.
6	Pada Minggu ke-5 yakni rentang waktu 18 September - 22 September 2023 peserta Magang di Rumah Rakyat DPR RI (MDRR) Komisi IX mengikuti rangkaian kegiatan yaitu, (1) Audiensi oleh Pusat Teknologi dan Informasi (Pustekinfo) Bersama Komisi II, Komisi IX, Komisi XI, Badan Anggaran dan Badan Legislasi yang bertempat di Command Center, (2) Kuliah Umum Parlemen Modern yang akan disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPR RI dan Kuliah Umum Diplomasi Parlemen yang disampaikan oleh Pimpinan BKSAP, DR. H. Fadli Zon, (3) Rapat Internal Panitia Kerja (Panja) Komisi IX DPR RI mengenai Pengawasan terhadap Percepatan Penurunan Stunting. Dalam kegiatan rapat ini kami sebagai peserta magang di Komisi IX juga turut berkesempatan untuk bertemu dan berkenalan langsung dengan anggota dewan Komisi IX, seperti Bapak Abidin Fikri, Ibu Tuti Nusandari, Ibu Itet Tridjajati, dan Ibu Aliyah Mustika Ilham, (4) Kunjungan Kerja Spesifik pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 ke Kabupaten Subang, Jawa Barat dalam rangka Pengawasan Mengenai Produk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji dengan Kandungan Gula, Garam, dan Lemak (GGL). Dalam kunjungan spesifik ini kami dibagi dalam beberapa kelompok dan didampingi oleh Sekretariat Komisi IX serta Tenaga Ahli Komisi IX, (5) Audiensi dengan Bagian Perpustakaan di Ruang Rapat Komisi IV. Kegiatan ini terbagi menjadi 2 sesi yang mana sesi I diawali dengan pemaparan materi mengenai Perpustakaan DPR RI dan

Minggu	Kegiatan
	dilanjutkan dengan <i>tour</i> perpustakaan DPR RI. Kegiatan kedua, yakni Audiensi dengan Badan Legislatif yang dipimpin oleh Bapak Widiharto.
7	Pada Minggu ke-7 yakni rentang waktu 25 September - 29 September 2023 peserta Magang di Rumah Rakyat DPR RI (MDRR) Komisi IX mengikuti rangkaian kegiatan yaitu, (1) Audiensi bersama dengan Badan Legislasi (Baleg) dengan 3 narasumber yakni, Willy Aditya, S.Fil., M.T., Desy Ratnasari, S.Psi., M.Si, M.Psi, dan Heri Gunawan, S.E. Audiensi ini pada dasarnya membahas perihal pentingnya disiplin, komitmen, membaca, serta diskusi bagi generasi muda Indonesia. Selanjutnya, dilanjutkan dengan Audiensi bersama dengan Komisi X dengan narasumber yakni, Dr. Andreas Hugo Pareira dengan topik mengenai politik dan profesi, (2) Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX dengan Dirjen Kesmas Kemenkes RI, Dirjen Farmalkes Kemenkes RI, Kepala BPKP Kemenkes RI, Ketua DJSN, Dewas BPJS Kesehatan, dan Dirut BPJS Kesehatan, (3) Rapat Kerja (Raker) Komisi IX dengan Kementerian Ketenagakerjaan yang membahas mengenai masalah ketenagakerjaan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri, (4) Penugasan <i>policy brief</i> tentang Kebijakan Pemerintah: menerapkan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dan Daftar Inventarisasi Masalah yang ditemukan dalam RDP Komisi IX dengan Dirjen Kesmas Kemenkes RI, Dirjen Farmalkes Kemenkes RI, Kepala BPKP Kemenkes RI, Ketua DJSN, Dewas BPJS Kesehatan, dan Dirut BPJS Kesehatan.
8	Pada Minggu ke-8 yakni rentang waktu 2 Oktober - 6 Oktober 2023 peserta Magang di Rumah Rakyat DPR RI (MDRR) Komisi IX mengikuti rangkaian kegiatan yaitu, (1) Diskusi bersama dengan mentor dan Tenaga Ahli Komisi IX mengenai <i>policy brief</i> yang telah disusun sebelumnya. Pada sesi diskusi ini <i>mentee</i> mendapatkan

Minggu	Kegiatan
	<p>masukan dan saran terkait bagaimana penyusunan <i>policy brief</i> yang harus berbasis pada data bukan asumsi pribadi, (2) Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang sekaligus Pengesahan Revisi UU IKN dan RUU ASN. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI yakni Sufmi Dasco Ahmad beserta pimpinan yang turut hadir diantaranya yakni Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus dan Rachmat Gobel, (3) Kuliah Umum dengan topik Dukungan Persidangan yang akan disampaikan oleh Deputi Bidang Persidangan di Ruang Rapat KK pada pukul 09.00 WIB oleh Suprihartini, S.IP., M.Si, (4) Penyusunan Laporan Kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 ke Kabupaten Subang, Jawa Barat dalam rangka Pengawasan Mengenai Produk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji dengan Kandungan Gula, Garam, dan Lemak (GGL).</p>
9	<p>Pada Minggu ke-9 yakni rentang waktu 9 Oktober - 13 Oktober 2023 peserta (MDRR) Komisi IX mengikuti rangkaian kegiatan yaitu, (1) Audiensi dengan Badan Akuntabilitas Negara (BAKN) yang membahas tentang tugas BAKN, tata cara penyampaian dan penyerahan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan, kriteria penelaahan BAKN DPR RI, dan <i>output</i> kinerja BAKN DPR RI, dilanjutkan dengan Audiensi dengan Komisi V yang membahas tentang ruang lingkup, mitra kerja, tugas, dan Tenaga Ahli Komisi V, (2) Kuliah Umum Biro Kesekretariatan Pimpinan, yang meliputi materi tentang, tugas dan fungsi Biro Kesekretariatan Pimpinan, struktur Biro Kesekretariatan Pimpinan, Kaukus Perempuan Parlemen RI, dan alur administrasi RUU oleh Presiden, (3) Kuliah Umum Biro dengan Komisi VII yang membahas mengenai Sistem Hukum Energi dan Pertambangan di Indonesia, seperti masalah hukum, konstruksi hukum tata kelola energi dan pertambangan, dan bagaimana peran mahasiswa dalam tata kelola energi dan</p>

Minggu	Kegiatan
	<p>pertambahan, (4) Audiensi dengan Analis Legislatif Ahli Madya Sekretariat Jenderal DPR RI Novianti, S.H., M.H. dengan topik pengantar mengenai penyusunan <i>policy brief</i> yang menjelaskan tentang bagaimana <i>policy brief</i> merupakan salah satu hal penting di DPR RI karena berperan sebagai ringkasan kebijakan yang berisikan evaluasi kritis dan analisis prediktif terhadap isu strategis untuk mendukung pelaksanaan fungsi, wewenang, tugas DPR RI serta sistematika penulisan <i>policy brief</i>.</p>
10	<p>Pada Minggu ke-10 yakni rentang waktu 17 Oktober - 20 Oktober 2023 peserta (MDRR) Komisi IX mengikuti rangkaian kegiatan yaitu, (1) Ngobrol Santai (Ngobras) bersama dengan mentor dan co-mentor. Pada kesempatan ini kami diberikan forum untuk berbincang dan berdiskusi santai dengan berbagai topik strategis/aktual tentang kesehatan dan ketenagakerjaan di Indonesia, (2) Kuliah Umum Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Legislatif Kepala Pusat Teknologi Informasi bersama Drs. Djaka Dwi Winarko, M.Si yang membahas tentang struktur organisasi Pusbangkom SDM Legislatif, tugas dan fungsi, pengembangan kompetensi ASN di Setjen DPR RI, (3) Pengerjaan tugas resume mengenai kuliah umum dan audiensi yang ditugaskan oleh mentor. Dari resume ini diharapkan peserta memperoleh poin-poin topik yang diperbincangkan dari kuliah umum dan audiensi sehingga lebih memahami apa yang disampaikan oleh narasumber, (4) Kegiatan English Club BKSAP dengan topik “Jakarta’s Air Pollution Crisis” oleh Naifah Uzlah, Founder of Economy for Ecology.</p>
11	<p>Pada Minggu ke-11 yakni rentang waktu 23 Oktober - 27 Oktober 2023 peserta (MDRR) Komisi IX mengikuti rangkaian kegiatan yaitu, (1) Pengerjaan <i>Terms of Reference</i> (ToR) Panitia Kerja (Panja) <i>Stunting</i> Komisi IX, (2) Kuliah Umum Pusat Pengembangan</p>

Minggu	Kegiatan
	<p>Kompetensi SDM Legislatif Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI bersama Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si dengan topik “Merawat Kebhinekaan”, (3) Kuliah Umum Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan Komjen Pol (P) Drs. H. Adang Daradjatun dengan topik “Kode Etik Kehormatan Dewan” yang membahas tentang tujuan, tugas dan wewenang MKD, tugas penegakan kode etik, dasar hukum hak imunitas DPR RI, (4) Kegiatan Nava Panca Cup yang merupakan bentuk bonding antar peserta MDRR, dimana setiap peserta dalam unit kerja akan diacak ke dalam grup-grup untuk mengikuti dan menjadi supporter dalam lomba.</p>
12	<p>Pada Minggu ke-12 yakni rentang waktu 30 Oktober-3 November 2023 peserta (MDRR) Komisi IX mengikuti rangkaian kegiatan yaitu, (1) Penugasan dari hasil diskusi bersama mentor, co-mentor, dan mentee: Tugas Membuat Daftar BUMN, seperti nama-nama BUMN, jenis sektor, dan yang lain sebagainya, (2) FGD BKSAP DPR RI yang bekerjasama dengan Aqsa Working Group (AWG) dalam rangka Bulan Solidaritas Palestina (BSP) 2023 yang bertempat di ruang pansus B. Acara ini dihadiri langsung oleh Dr. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc, Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Duta Besar Sudan untuk Indonesia, dan Penyair Taufiq Ismail, (3) Audiensi dengan Komisi X bersama Wakil Ketua Komisi X, Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, yang membahas tentang MPP tentang kebijakan publik. yang meliputi beberapa pembahasan seperti, proses pengambilan, aktor, dan problematika kebijakan publik, (4) Pengarahan dari mentor dan co mentor mengenai Audiensi bersama Wakil Ketua Komisi IX Bapak Melkiades Laka Lena yang akan dilaksanakan pada hari Senin, 6 November 2023 yang dilanjutkan dengan melakukan pembagian jobdesk untuk kegiatan</p>

Minggu	Kegiatan
	Audiensi bersama Wakil Ketua Komisi IX Bapak Melkiades Laka Lena dan dilakukan juga pengerjaan hal-hal yang diperlukan dalam Audiensi, seperti <i>script</i> MC, moderator, ToR, dan yang lain sebagainya.
13	Pada Minggu ke-13 yakni rentang waktu 6 November - 11 November 2023 peserta (MDRR) Komisi IX mengikuti rangkaian kegiatan yaitu, (1) Audiensi dengan Wakil Komisi IX, Emanuel Melkiades Laka Lena dengan mengusung tema <i>Sharing Session</i> . Adapun segala persiapan mulai dari plotting <i>jobdesk</i> , penyusunan <i>rundown</i> , doa, hingga video profil dilakukan oleh peserta magang Komisi IX dengan arahan dan masukan dari mentor serta co-mentor Komisi IX, (2) Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan RI yakni dengan agenda: Prioritas Nasional Bidang Kesehatan Tahun 2023 serta langkah strategis dalam percepatan capaian targetnya, Penjelasan terkait perkembangan pembahasan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan pembahasan isu faktual kesehatan yang sedang terjadi, (3) Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX mengenai Efektivitas Upah Minimum Regional Terhadap Pekerja ke Kota Depok. Kegiatan ini memberikan pengalaman dan pengetahuan baru bagi peserta, bahwa nyatanya di Indonesia utamanya di Kota Depok masih banyak permasalahan berkaitan dengan kesejahteraan pekerja, (4) Kuliah Umum dengan Kepala Badan Keahlian Setjen DPR RI, Dr. Inosentius Samsul, S.H. M.Hum dengan topik “Peran Badan Keahlian DPR RI dalam Pembentukan Undang-Undang.
14	Pada Minggu ke-14 yakni rentang waktu 13 November - 17 November 2023 peserta (MDRR) Komisi IX mengikuti rangkaian kegiatan yaitu, (1) Kegiatan Audiensi yang bertempat di Komisi X oleh Muhammad Nur Purnamasidi Anggota Komisi V DPR RI.

Minggu	Kegiatan
	<p>Adapun topik yang dibawakan pada audiensi ini adalah “Goals Menjadi Seorang Politikus” yang membahas tentang politik yang benar vs yang salah, peran politikus, bagaimana pemuda Indonesia harus mampu menguasai banyak hal, seperti ilmu politik, ekonomi, dan sosial, (2) Audiensi dengan Badan Anggaran bersama Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Dr. H. Cucun Ahmad Syamsurijal, M.A.P dengan topik “Fungsi Anggaran DPR RI” yang membahas tentang konsep anggaran negara, penyusunan APBN, siklus anggaran, dan mekanisme pengambilan keputusan, (3) Audiensi dengan Komisi X, yaitu Ir. H. Nuroji yang membahas mengenai pendidikan dan karakter dan perilaku pejabat/masyarakat, (4) Pengerjaan Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX mengenai Efektivitas Upah Minimum Regional Terhadap Pekerja ke Kota Depok.</p>
15	<p>Pada Minggu ke-15 yakni rentang waktu 20 November - 24 November 2023 peserta (MDRR) Komisi IX mengikuti rangkaian kegiatan yaitu, (1) Diskusi pengerjaan tugas yang telah diberikan oleh mentor dan co-mentor yakni daftar BUMN, serta diskusi mengenai video yang berisikan tentang Saemaul Undong yang merupakan contoh strategi pembangunan Pemerintah Korea dalam pertumbuhan ekonomi Korea dari negara miskin menjadi negara maju. Dalam diskusi ini mentee diajak untuk menganalisis apakah strategi yang digunakan Korea ini masih relevan diterapkan di Indonesia, (2) Persiapan simulasi Rapat Panitia Kerja (Panja), Rapat Kerja (Raker), dan Sidang Paripurna yang dilakukan melalui zoom meeting. Dalam simulasi sidang ini dijelaskan mengenai materi-materi apa saja yang akan dibahas dalam simulasi, seperti DIM RUU KUHP dan PDP. Peserta magang MDRR DPR RI terbagi menjadi beberapa peran, seperti pimpinan dan ketua fraksi. Di samping itu,</p>

Minggu	Kegiatan
	<p>peserta juga terbagi dalam 7 fraksi sesuai dengan jumlah fraksi yang ada di DPR RI periode saat ini, (3) Audiensi dengan Komisi V oleh Drs. H. Mulyadi yang membahas tentang parameter sukses, orientasi pekerjaan, dan 5 hal yang harus dipegang dalam menuju kesuksesan, yaitu <i>character, chemistry, competence, clear, dan criteria</i>, (4) Audiensi dengan Komisi X oleh Ledia Hanifa Amaliah, S.Si., M.Psi.T yang membahas tentang ruang publik yang setara dan inklusif, (5) Kegiatan “Harmoni Nava Panca” yang dilaksanakan di Kopo, Bogor Jawa Barat yang diselenggarakan selama satu hari satu malam. Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan bonding peserta MDRR Batch 3 2023 yang berisikan berbagai agenda, seperti perlombaan, penampilan, serta dialog hangat bersama dengan sekretaris jenderal DPR RI.</p>
16	<p>Pada Minggu ke-16 yakni rentang waktu 27 November - 1 Desember 2023 peserta (MDRR) DPR RI mengikuti rangkaian kegiatan yaitu, (1) Simulasi yang dilaksanakan dalam 3 hari, yaitu tanggal 29 November 2023 - 1 Desember 2023. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid, yaitu <i>online</i> dan <i>offline</i> dengan diskusi mengenai pendapat kelompok fraksi mengenai DIM RUU yang akan diangkat dalam rapat kerja. Kegiatan ini merupakan simulasi pertama yang diikuti oleh saya sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat. Melihat dinamika rapat, interupsi, dan sanggahan pendapat antara satu sama lain memberikan pengalaman baru kepada saya bahwa ternyata dinamika politik sangat menarik, (2) Simulasi Sidang Paripurna yang dilakukan secara <i>offline</i> di Ruang Sidang Paripurna. Seluruh mahasiswa berperan dan bersidang layaknya anggota dewan DPR RI. Situasi sidang paripurna dapat dikatakan sangat memanas karena banjirnya interupsi baik dari pimpinan maupun anggota fraksi. Dimana, masing-masing fraksi berupaya untuk berpegang kuat pada</p>



Minggu	Kegiatan
	pandangannya sehingga musyawarah dan mufakat pun tak tercapai sehingga dilakukan pengambilan suara terbanyak atau voting. Simulasi ini merupakan pengalaman yang berkesan bagi saya pribadi sebagai mahasiswa yang tak banyak memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum dan politik.
17	Pada Minggu ke-17 yakni rentang waktu 4 Desember - 1 Desember 2023 peserta (MDRR) DPR RI mengikuti dua kegiatan Audiensi yang terdiri atas: Audiensi bersama dengan Komisi X bersama Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian yang membahas mengenai <i>youth empowerment</i> , mewujudkan generasi emas. Dalam Audiensi ini Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian menjelaskan bahwa keberhasilan bukanlah milik orang pintar, melainkan adalah milik mereka yang senantiasa berusaha. Generasi muda merupakan modal atau aset besar pembangunan bangsa Indonesia. Untuk itu, generasi muda perlu menguasai soft skill seperti komunikasi, berpikir kritis, adaptasi, leadership, kerjasama, networking, dan manajemen waktu untuk membangun masa depan yang cerah. Audiensi kedua yaitu bersama dengan Badan Anggaran bersama Tenaga Ahli Badan Anggaran DPR RI yang membahas tentang landasan pengelolaan keuangan negara, pengertian dan ruang lingkup, asas pengelolaan keuangan negara, penyusunan dan penetapan APBN, dan pertanggungjawaban APBN, (2) Pengerjaan <i>project</i> akhir yaitu video, laporan akhir MDRR Komisi IX DPR RI, dan laporan akhir MSIB MBKM.
18	Pada Minggu ke-18 yakni rentang waktu 11 Desember - 15 Desember 2023 peserta (MDRR) DPR RI mengikuti rangkaian kegiatan yaitu, (1) Audiensi bersama dengan Tenaga Ahli Komisi IX Bidang Kesehatan, Fitriana Yuliatwati, S.KM, M.Kes dengan topik “Peran Tenaga Ahli Dalam Mendukung Tugas Fungsi DPR RI”. Dalam

Minggu	Kegiatan
	<p>Audiensi ini dijelaskan mengenai bagaimana pengalaman hidup Ibu Fitriana menuju karirnya menjadi Tenaga Ahli Komisi IX. Kemudian dijelaskan pula bagaimana memiliki pengetahuan politik, dimana politik merupakan tempat sebuah kebijakan negara dibentuk. Di samping itu, dipaparkan mengenai 3 fungsi DPR RI, (2) Pengerjaan <i>project</i> akhir yaitu video, laporan akhir MDRR Komisi IX DPR RI, dan laporan akhir MSIB MBKM. Di samping itu, peserta juga mengikuti Kuliah Umum Biro Pemberitaan Parlemen bersama dengan Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si, (3) Pengerjaan <i>project</i> akhir yaitu video, laporan akhir MDRR Komisi IX DPR RI, dan laporan akhir MSIB MBKM.</p>

## BAB IV

### CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

#### 4.1 Deskripsi

Jurusan kesehatan masyarakat memainkan peran sentral dalam membangun kesehatan masyarakat yang berkelanjutan, merata, dan meningkatkan kualitas hidup bagi individu dan komunitas. Winslow (1920) mendefinisikan kesehatan masyarakat (*public health*) sebagai ilmu dan seni mencegah penyakit, memperpanjang hidup, dan meningkatkan kesehatan melalui usaha-usaha pengorganisasian masyarakat untuk perbaikan sanitasi lingkungan, pemberantasan penyakit menular, pendidikan untuk kebersihan perorangan, pengorganisasian pelayanan medis, perawatan, diagnosis dini dan pengobatan, pengembangan rekayasa sosial untuk menjamin setiap orang terpenuhi kebutuhan hidup yang layak dalam memelihara kesehatan (dalam Notoatmodjo, 2003).

Administrasi dan kebijakan kesehatan (AKK) merupakan salah satu peminatan dalam jurusan kesehatan masyarakat yang berfokus pada pemahaman dan penerapan konsep manajemen serta kebijakan dalam konteks kesehatan populasi. Dalam peminatan ini, mahasiswa mendalami konsep perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan kesehatan. Magang di MDRR Komisi IX DPR RI memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengetahui secara langsung bagaimana keterlibatan manajemen sumber daya, perencanaan strategis, dan pengambilan keputusan secara holistik dengan melibatkan berbagai *key stakeholder* dalam bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan kependudukan. Hal tersebut diperoleh dari keikutsertaan mahasiswa magang dalam berbagai agenda Sekretariat Jenderal Komisi IX DPR RI yaitu Rapat Kerja (Raker), Rapat Dengar Pendapat (RDP), Rapat Panitia Kerja (Panja), hingga Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek).

## **4.2 Hasil Pembelajaran Dalam Rangka Pencapaian *Learning Outcome* Mata Kuliah**

### **4.2.1 Analisis Kebijakan Kesehatan**

#### **A. Deskripsi**

Analisis kebijakan kesehatan adalah hasil pengembangan dari analisis kebijakan publik. Adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan kebutuhan bidang kesehatan terhadap adanya analisis kebijakan, maka demikian hadirilah analisis kebijakan kesehatan. Analisis kebijakan dalam konteks kesehatan merupakan jenis penelitian terapan yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terkait permasalahan kesehatan masyarakat secara menyeluruh sehingga akan ditemukan alternatif solusi sebagai pemecahan masalah. Analisis kebijakan kesehatan dilakukan dengan menciptakan, menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan terkait kebijakan kesehatan dalam satu atau lebih tahapan proses pembuatan kebijakan. Menurut Dunn (1978), analisis kebijakan menggunakan beberapa pendekatan dalam pelaksanaannya, yaitu pendekatan empiris, evaluatif, dan normatif. Berikut merupakan pendekatan analisis kebijakan.

7. Pendekatan empiris, berfokus pada esensi permasalahan yaitu apakah suatu hal benar-benar ada (menyangkut fakta). Pendekatan ini menyoroti penjelasan hubungan sebab akibat dalam konteks kebijakan. Jenis informasi yang dihasilkan dalam pendekatan ini adalah identifikasi.
8. Pendekatan evaluatif, berfokus pada masalah pokok yaitu menentukan nilai atau harga dari berbagai kebijakan. Jenis informasi yang dihasilkan dalam pendekatan ini adalah evaluasi.
9. Pendekatan normatif, berfokus pada masalah pokok yaitu tindakan pada esensi permasalahan yaitu tindakan apa yang seharusnya diambil. Inti dari pendekatan normatif adalah memberikan saran dan arah tindakan yang dapat menyelesaikan masalah kebijakan.

Jenis informasi yang dihasilkan dalam pendekatan ini adalah rekomendasi.

**B. *Learning Outcome* di Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI** Capaian pembelajaran pada Mata Kuliah Analisis Kebijakan Kesehatan di Setjen DPR RI adalah sebagai berikut.

1. Menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI dengan Dirjen Kesmas, Kemenkes RI, Dirjen Farmalkes Kemenkes RI, Kepala BPKP Kemenkes RI, Ketua DJSN, Dewas BPJS Kesehatan, dan Dirut BPJS Kesehatan terkait dengan penyelenggaraan JKN di Indonesia. DIM merupakan daftar yang berisi masalah-masalah yang dihadapi dalam suatu kegiatan atau program sehingga dapat ditentukan prioritas penanganannya. Penyusunan DIM tersebut merupakan salah satu implementasi dari Mata Kuliah Analisis Kebijakan Kesehatan, karena dalam proses penyusunannya mahasiswa dapat mengidentifikasi, menilai, dan memahami masalah yang dihadapi dalam suatu program kesehatan terhadap masyarakat secara langsung. Dalam RDP ini, mahasiswa juga memperoleh pemahaman tentang bagaimana lembaga legislatif bersama dengan lembaga eksekutif dan pemerintahan merancang dan melaksanakan evaluasi kebijakan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti efektivitas, efisiensi, dan *equity* dalam suatu program kebijakan.
2. Menyusun *policy brief* tentang hasil Audiensi Komisi IX DPR RI dengan Dinas Kabupaten Kupang tentang Konsultasi dan Koordinasi terkait Belanja BOK tahun 2023 dan 2024 dan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI dengan Dirjen Kesmas, Kemenkes RI, Dirjen Farmalkes Kemenkes RI, Kepala BPKP Kemenkes RI, Ketua DJSN, Dewas BPJS Kesehatan, dan Dirut BPJS Kesehatan tentang Kebijakan Pemerintah dalam Menerapkan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). *Policy brief*

merupakan ringkasan singkat yang menyajikan argumen yang kuat, analisis singkat, dan rekomendasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Dengan menyusun *policy brief*, mahasiswa dapat mengidentifikasi masalah kesehatan masyarakat, memahami konteks kebijakan, dan mengevaluasi opsi kebijakan yang tersedia. Di samping itu, mahasiswa juga belajar untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang efektif dan efisien.

3. Menyusun daftar permasalahan dan pertanyaan untuk kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Kabupaten Subang, Jawa Barat dalam rangka Pengawasan Mengenai Produk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji dengan Kandungan Gula, Garam, dan Lemak (GGL) serta Kunjungan Kerja Spesifik DPR RI ke Kota Depok, Jawa Barat dalam rangka Efektivitas UMR Terhadap Pekerja. Penyusunan daftar permasalahan dan pertanyaan tentu didasari dengan data dan fakta, serta peraturan baik Peraturan Menteri Kesehatan, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, Peraturan Daerah, dan/atau Peraturan Walikota sebagai rujukan terkait dengan isu atau topik yang sedang berlangsung. Dengan menyusun daftar permasalahan dan pertanyaan tersebut, mahasiswa dapat mengetahui kesesuaian peraturan dan kebijakan yang ada dengan implementasi Produk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji dengan Kandungan Gula, Garam, dan Lemak (GGL) di Kabupaten Subang dan Efektivitas UMR Terhadap Pekerja di Kota Depok. Mahasiswa juga dapat memahami bagaimana dinamika dan interaksi antar lembaga, serta pengaruh berbagai *stakeholder* terhadap suatu kebijakan. Hal tersebut, dapat memberikan pemahaman kontekstual terhadap mahasiswa tentang faktor pengaruh keberhasilan atau kegagalan dari implementasi kebijakan.

#### 4.2.2 Manajemen Strategis di Bidang Kesehatan

##### A. Deskripsi

Manajemen strategis adalah disiplin ilmu yang mengintegrasikan kebijakan bisnis dengan penyesuaian dengan lingkungan dan tekanan dalam pengambilan keputusan strategis. Manajemen strategis merupakan proses dinamis karena berlangsung secara berkelanjutan dalam suatu organisasi. Strategi yang diambil berdasarkan peninjauan ulang dan penyesuaian dengan kebutuhan untuk mencapai kinerja yang optimal dan efektif di organisasi. Secara umum, tahapan manajemen strategis melibatkan penetapan visi dan misi, perumusan strategi dan analisis SWOT (*strengths, weakness, opportunities, threats*), penetapan strategi, dan evaluasi terhadap strategi tersebut.

##### B. *Learning Outcome* di Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI

Capaian pembelajaran pada Mata Kuliah Manajemen Strategis di Setjen DPR RI yaitu kajian mahasiswa terkait dengan Kebijakan Pemerintah dalam Menerapkan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) adalah kebijakan yang diterapkan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk memberikan fasilitas dan pelayanan kesehatan yang sama bagi peserta BPJS Kesehatan demi meningkatkan mutu dan kualitas layanan kesehatan terutama rawat inap. Konsep KRIS adalah menghadirkan satu kelas standar agar masyarakat memiliki hak yang sama dalam mengakses layanan kesehatan yang mendasar. Dengan demikian, program ini akan mengurangi iuran bulanan untuk anggota kelas I dan II Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), skema asuransi kesehatan nasional Indonesia, serta juga akan menghapuskan layanan kelas I, II, dan III dari BPJS Kesehatan menjadi satu atau kelas standar.

Dengan adanya kajian ini mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan teoritis dan keterampilan praktis dalam implementasi kebijakan kesehatan di Indonesia. Adapun langkah awal proses

manajemen strategis adalah dengan analisis eksternal, yaitu *scanning*, *monitoring*, *forecasting*, dan *assessing*. *Scanning* dilakukan dengan mengidentifikasi perubahan yang mungkin terjadi dan yang sedang terjadi di lingkungan umum. *Monitoring* mengamati perubahan lingkungan yang sedang terjadi. *Forecasting* mengembangkan proyeksi tentang apa yang akan terjadi. *Assessing* menentukan saat perubahan lingkungan dan pengaruh perubahan lingkungan serta kecenderungan dalam manajemen strategis perusahaan. Analisis eksternal ini biasa digambarkan dalam bentuk analisis SWOT, yaitu metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Berikut ini merupakan kerangka analisis SWOT terkait dengan kebijakan pemerintah dalam menerapkan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

#### 1. *Strengths* (S)

*Strength* merupakan analisis kekuatan yaitu kondisi yang memberikan kekuatan dan keunggulan bagi suatu kebijakan atau organisasi. Analisis *strength* pada kebijakan pemerintah dalam menerapkan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) adalah sebagai berikut.

##### a. Standar kualitas pelayanan yang tinggi

Kebijakan KRIS memberikan standar kualitas yang jelas dan tertulis untuk layanan kesehatan di kelas rawat inap. Hal ini dapat membantu menyediakan pedoman bagi penyedia layanan kesehatan untuk memastikan pelayanan kesehatan yang diberikan berkualitas tinggi.

##### b. Peningkatan kesetaraan akses pelayanan

Implementasi Kebijakan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dapat menjamin bahwa standar pelayanan kesehatan di semua rumah sakit di Indonesia setara. Ini memiliki potensi untuk mengurangi perbedaan dalam kualitas pelayanan antar fasilitas



kesehatan di seluruh Indonesia. Dengan menerapkan standar pelayanan yang seragam, KRIS dapat berperan dalam mengurangi diskriminasi dan prasangka dalam pemberian pelayanan kesehatan, tanpa memandang latar belakang atau lokasi pasien.

c. Pengelolaan sumber daya yang lebih efisien

1) Pengelolaan tenaga kesehatan

Dengan menetapkan standar terkait jumlah dan kualifikasi tenaga kesehatan, KRIS dapat membantu perencanaan dan pengelolaan sumber daya manusia secara lebih efisien. Ini termasuk distribusi staf dan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan sesuai dengan standar pelayanan.

2) Pengendalian biaya dan pengelolaan anggaran

Standar KRIS dapat membantu dalam pengendalian biaya dan pengelolaan anggaran dengan memastikan bahwa setiap elemen pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Hal ini dapat mengoptimalkan alokasi anggaran secara lebih efisien.

3) Penggunaan ruang rawat inap yang efektif

Melalui penataan standar pelayanan, KRIS dapat membantu penggunaan ruang rawat inap yang lebih efektif. Ini mencakup penempatan pasien sesuai dengan tingkat keparahan penyakit, mengoptimalkan kapasitas kamar, dan memastikan pasien mendapatkan perawatan yang sesuai.

3. *Weakness* (W)

*Weakness* merupakan analisis kelemahan yaitu kondisi yang menjadi kelemahan bagi suatu kebijakan atau organisasi. Analisis *weakness* pada kebijakan pemerintah dalam menerapkan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) adalah sebagai berikut.

a. Ketidaksesuaian dengan kondisi lokal

Kebijakan yang tidak memperhitungkannya perbedaan kondisi dan kebutuhan di setiap wilayah oleh dapat dianggap sebagai kelemahan. Adanya variasi dalam kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur antar wilayah memerlukan suatu pendekatan yang lebih adaptif dan fleksibel.

b. Minimnya sumber daya

Kebijakan yang tidak diikuti dengan alokasi sumber daya yang memadai, seperti dana, personel, dan infrastruktur, dapat menyebabkan kesulitan dalam memenuhi standar yang ditetapkan. Jika terdapat ketidaksetaraan dalam alokasi dana atau subsidi antar rumah sakit atau wilayah, kebijakan ini mungkin tidak berhasil mencapai kesetaraan akses dan kualitas pelayanan.

4. *Opportunities* (P)

*Opportunities* merupakan analisis peluang yaitu kondisi di luar yang dapat memberikan peluang untuk berkembang di masa yang akan datang. Analisis *opportunities* pada kebijakan pemerintah dalam menerapkan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) adalah sebagai berikut.

a. Peningkatan kredibilitas pelayanan kesehatan

Standar yang terukur yang diimplementasikan melalui KRIS dapat memberikan pengakuan kepada lembaga kesehatan Indonesia. Hal tersebut dapat memperkuat citra rumah sakit dan fasilitas kesehatan di mata lembaga kesehatan global, organisasi internasional, dan mitra potensial.

b. Peluang kerjasama dengan institusi kesehatan global

Kebijakan KRIS dapat membuka pintu untuk kerjasama dan kemitraan dengan institusi kesehatan global. Kerjasama ini dapat mencakup pertukaran tenaga medis, pelatihan, dan transfer teknologi, yang semuanya dapat meningkatkan kapasitas dan keahlian di sektor kesehatan Indonesia.

#### 4. *Threats* (T)

*Threats* merupakan analisis ancaman yaitu faktor lingkungan yang tidak menguntungkan bagi suatu kebijakan atau organisasi. Analisis *threats* pada kebijakan pemerintah dalam menerapkan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) adalah sebagai berikut.

##### a. Resistensi dan penolakan Rumah Sakit

Resistensi dapat muncul karena ketidakpastian terhadap perubahan KRIS. Rumah sakit yang sudah terbiasa dengan sistem lama mungkin khawatir tentang implikasi operasional, biaya tambahan, atau perubahan dalam tuntutan kerja. Di samping itu, jika rumah sakit merasa bahwa standar yang ditetapkan oleh KRIS tidak sesuai dengan kondisi lokal atau kebutuhan spesifik mereka, hal tersebut dapat menyebabkan ketidaksetujuan. Kondisi geografis, sosial, atau ekonomi yang berbeda dapat memerlukan pendekatan yang lebih fleksibel.

##### b. Tenaga kesehatan

Tenaga kesehatan mungkin akan merasa bahwa implementasi KRIS dapat menambah beban kerja atau mengubah dinamika kerja yang sudah ada.

##### c. Beban keuangan

Implementasi KRIS mungkin memerlukan investasi awal yang signifikan, termasuk biaya pelatihan tenaga kesehatan, pengadaan peralatan medis sesuai standar, dan infrastruktur yang memenuhi ketentuan. Jika rumah sakit tidak mampu menutupi peningkatan biaya ini melalui pendapatan yang seimbang, maka krisis keuangan dapat terjadi.

##### d. Potensi pengurangan pendapatan

Implementasi KRIS mungkin mengharuskan rumah sakit untuk mengurangi jumlah pasien yang dirawat agar mematuhi standar.

Jika ini mengakibatkan penurunan pendapatan karena kurangnya pasien atau pembayaran yang lebih rendah, rumah sakit dapat mengalami tekanan keuangan yang signifikan.

#### **4.2.3 Pemasaran Jasa Bidang Kesehatan**

##### **A. Deskripsi**

Pemasaran adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan keinginan dan jasa baik kepada para konsumen saat ini maupun konsumen potensial (Stanton, 1996). Pemasaran adalah suatu aktivitas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang ada melalui penciptaan proses pertukaran yang saling menguntungkan. Aktivitas pemasaran tersebut antara lain perencanaan produk, kebijakan harga, melakukan promosi, distribusi, penjualan, pelayanan, membuat strategi pemasaran, riset pemasaran, sistem informasi pemasaran dan lain-lain yang terkait dengan pemasaran (Boone & Kurtz, 2000).

##### **B. *Learning Outcome* di Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI**

Capaian pembelajaran pada Mata Kuliah Pemasaran Jasa Bidang Kesehatan di Setjen DPR RI mencakup strategi untuk mempromosikan, menginformasikan, dan berkomunikasi efektif terkait kebijakan, program, dan inisiatif di sektor kesehatan. Dengan menerapkan strategi pemasaran yang holistik dan melibatkan berbagai saluran komunikasi, Komisi IX DPR RI dapat lebih efektif dalam menyampaikan informasi dan mendapatkan dukungan masyarakat terkait dengan kebijakan dan program kesehatan di daerah pilih masing-masing. Pada dasarnya, *learning outcome* Mata Kuliah Pemasaran Jasa Bidang Kesehatan di Setjen DPR RI terbatas. Akan tetapi, salah satu implementasi pemasaran jasa bidang kesehatan yang dapat diidentifikasi mahasiswa adalah program kolaborasi antara Komisi IX DPR RI dengan pemerintah maupun swasta, yaitu program Koalisi Bersama (Kobar) Lawan Demam Berdarah Dengue (DBD). Kobar Lawan DBD merupakan program

percepatan pencapaian target nol kematian penyakit demam berdarah (*dengue*). Berikut ini merupakan beberapa strategi pemasaran yang dapat diidentifikasi.

a. Segmentasi

Daerah dengan wilayah riwayat tinggi kasus DBD

b. *Targeting*

Kelompok dengan risiko tinggi terkena DBD (anak dan orang tua)

c. *Positioning*

Kolaborasi pemerintah, swasta, dan komunitas

Adapun aspek bauran pemasaran dalam program Koalisi Bersama (Kobar) Lawan Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah sebagai berikut:

a. *Product*, Program Koalisi Bersama (Kobar) Lawan Demam Berdarah Dengue (DBD)

b. *Price, non-profit*

c. *Place, pilot project* di 6 Kota di Indonesia yaitu, Bali, Bandung, Jakarta, Semarang, Kupang, dan Bontang

d. *Promotion*, media sosial, pers, dan pamflet

e. *People*, Komisi IX DPR RI, Kementerian Kesehatan, dan Swasta (PT. Takeda Innovative Medicine)

f. *Process*, Kampanye “Ayo 3M Plus dan Vaksin DBD”

g. *Physical evidence*, dokumentasi visual, brosur, pamflet, dokumen laporan kegiatan

#### 4.2.4. Sistem Informasi Manajemen Kesehatan dan Rumah Sakit

##### A. Deskripsi

Sistem Informasi merupakan sebuah alat atau sarana yang bertujuan untuk mengolah data menjadi informasi, yang dapat dimanfaatkan oleh pengambil keputusan sehingga dapat menyebarkan informasi secara cepat dan tepat (F.Hidayat, 2020). Sedangkan menurut PP No. 46 tahun 2014 menyebutkan bahwa Sistem Informasi Kesehatan adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, dan sumber daya

manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan kesehatan.

#### **B. *Learning Outcome* di Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI**

Capaian pembelajaran pada Mata Kuliah Sistem Informasi Manajemen Kesehatan dan Rumah Sakit di Setjen DPR RI pada dasarnya terbatas. Akan tetapi, salah satu implementasi yang dapat diperoleh mahasiswa terkait dengan mata kuliah ini adalah dari Rapat Kerja (Raker) Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan RI yang membahas mengenai UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dampak polusi udara pada kesehatan, RRT: *lessons learned* pengendalian polusi, serta upaya sektor kesehatan Indonesia. Dalam Raker tersebut dijelaskan mengenai bagaimana keadaan sistem informasi kesehatan Indonesia secara umum. Penyelenggaraan pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui pengelolaan pembangunan kesehatan yang disusun dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN). Untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang efektif dan efisien diperlukan informasi kesehatan. Informasi kesehatan digunakan sebagai masukan pengambilan keputusan dalam setiap proses manajemen kesehatan baik manajemen pelayanan kesehatan, manajemen institusi kesehatan, maupun manajemen program pembangunan kesehatan atau manajemen wilayah. Di samping itu, dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pemerintah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh akses terhadap informasi kesehatan. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan meliputi:

- a. Pelaksanaan Sistem Informasi Kesehatan yaitu data kesehatan, informasi kesehatan, indikator kesehatan, sumber data dan informasi, pengumpulan data dan informasi, pengolahan data dan informasi, penyimpanan data dan informasi, keamanan, dan kerahasiaan informasi

- b. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
- c. Sumberdaya Sistem Informasi Kesehatan
- d. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan
- e. Penyebarluasan dan Penggunaan Data dan Informasi Kesehatan

#### 4.2.5 Asuransi Kesehatan

##### A. Deskripsi

Pengertian Asuransi menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian Pasal 1 ayat (1) pada dasarnya merupakan perjanjian antara para pihak yaitu penanggung dan tertanggung, dimana penanggung menerima sejumlah premi sebagai timbal balik atas pemberian penggantian kepada tertanggung karena suatu kerugian yang terjadi akibat peristiwa pada suatu waktu yang tidak pasti. Asuransi kesehatan adalah sebuah jenis produk asuransi yang secara khusus menjamin biaya kesehatan atau perawatan para anggota asuransi tersebut jika mereka jatuh sakit atau mengalami kecelakaan (A.H. Suwignjo, 2019). Mata Kuliah Asuransi Kesehatan mempelajari terkait dengan sistem asuransi yaitu meliputi sistem pembiayaan kesehatan, konsep asuransi, asuransi dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), teknik *managed care*, teknik perhitungan premi, dan sebagainya.

##### B. *Learning Outcome* di Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI

Capaian pembelajaran pada Mata Kuliah Asuransi Kesehatan di Setjen DPR RI adalah sebagai berikut.

- a. Kajian mahasiswa dalam penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI dengan Dirjen Kesmas, Kemenkes RI, Dirjen Farmalkes Kemenkes RI, Kepala BPKP Kemenkes RI, Ketua DJSN, Dewas BPJS Kesehatan, dan Dirut BPJS Kesehatan terkait dengan penyelenggaraan JKN di Indonesia. Dalam kajian ini, mahasiswa memperoleh pengetahuan teoritis terkait dengan konsep program JKN dan dapat memahami permasalahan penyelenggaraan JKN di Indonesia. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sebagai wujud komitmen Pemerintah Indonesia dalam memberikan kepastian kesehatan yang menyeluruh, guna mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan sejahtera. Pelaksanaan seluruh program JKN diintegrasikan ke dalam suatu badan hukum yang disebut dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Pelaksanaan program JKN dilaksanakan secara komprehensif baik di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) di seluruh daerah di Indonesia. Beberapa temuan masalah yang ditemukan dalam RDP Penyelenggaraan JKN adalah sebagai berikut.

- 1) Keluhan masyarakat terkait dengan perlakuan diskriminatif dalam menerima pelayanan kesehatan. Di samping itu, seringkali ditemukan adanya penolakan pasien di rumah sakit karena beberapa alasan seperti, tidak adanya dokter, kamar rawat inap penuh, dan jadwal operasi yang harus menunggu berbulan lamanya. Beberapa kasus juga ditemukan adanya pemulangan pasien secara mendadak, sementara kondisi pasien belum memungkinkan untuk dipulangkan.
- 2) Target kepesertaan BPJS Kesehatan yang belum tercapai, yaitu total imbal hasil investasi dengan target 5,85%, sementara realisasinya hanya 5,47%, jumlah rekrutmen peserta baru kurang dari 13.500.000 peserta, serta jumlah aktif peserta PBU dengan target 83%, sementara cakupannya hanya 52%.
- 3) Total sejumlah 24 juta orang putus kepesertaan BPJS Kesehatan PBI.
- 4) Kinerja BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan yang dinilai rendah dengan tercermin dari rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan Indonesia.
- 5) Tidak tampaknya kaitan antara 6 pilar transformasi kesehatan dengan pelayanan BPJS Kesehatan yang menunjukkan bahwa



komunikasi dan koordinasi antara Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan belum terintegrasi.

- 6) Aplikasi JKN tidak menjangkau masyarakat di seluruh daerah di Indonesia dan hanya dapat digunakan oleh masyarakat di kota.
- b. Kajian mahasiswa dalam penyusunan *Terms of Reference* (ToR) dan Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Kota Depok, Jawa Barat dalam rangka “Efektivitas UMR Terhadap Pekerja”. Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Depok tahun 2023 bahwa total penduduk bekerja adalah 1.160.313 orang dengan capaian kepesertaan hanya sebesar 307.849 orang. Dalam kajian ini, mahasiswa memperoleh pemahaman terkait dengan realitas pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

## BAB V PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

1. Magang di Rumah Rakyat (MDRR) DPR RI merupakan program magang di DPR RI yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa Indonesia melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Peserta magang mempelajari pelaksanaan ketiga fungsi DPR RI dan Diplomasi Parlemen melalui keterlibatan pada rangkaian proses tugas dan fungsi DPR RI secara langsung dan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai *supporting system* DPR RI yang berstatus sebagai aparatur pemerintah. MDRR DPR RI mengukung aktivitas *Parliamentary Internship Program* (Pattern Pro) yang terdiri atas 6 kerangka agenda, yaitu observasi, kuliah umum, audiensi, magang, simulasi, dan evaluasi sesuai dengan posisi yang ditempatkan sesuai dengan kebutuhan di unit kerja eselon II.
2. Kegiatan magang dilaksanakan di Sekretariat Jenderal DPR RI pada tanggal 14 Agustus 2023 – 23 Desember 2023. Dalam kegiatan Magang di Rumah Rakyat (MDRR) DPR RI mahasiswa terbagi menjadi beberapa unit kerja sesuai dengan minat dan jurusan mahasiswa. Mahasiswa ditempatkan di Sekretariat Jenderal Komisi IX DPR RI dengan juga turut mengikuti berbagai agenda yaitu, Rapat Kerja (Raker), Rapat Dengar Pendapat (RDP), Rapat Panitia Kerja (Panja), hingga Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek). Di samping itu, mahasiswa diajak untuk menyusun *Policy Brief*, Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), *Terms of Reference* (ToR), Laporan Kunjungan Kerja, hingga mengikuti Sidang Rapat Panitia Kerja, Rapat Kerja, dan Sidang Paripurna DPR RI. Dari kegiatan magang ini, mahasiswa juga mengaitkan dengan Mata Kuliah Administrasi Kebijakan Kesehatan di Semester 7 yang meliputi Analisis Kebijakan, Pemasaran Jasa Bidang Kesehatan, Asuransi Kesehatan, Manajemen

Strategis di Bidang Kesehatan, Sistem Informasi Manajemen Kesehatan dan Rumah Sakit, dan Metode Penelitian.

## **5.2 Saran**

### **5.2.1 Bagi Mahasiswa**

1. Mahasiswa disarankan untuk meningkatkan pemahaman dasar terkait dengan hukum dan politik, unit kerja yang ditempatkan, dan struktur dan fungsi lembaga DPR RI secara keseluruhan sebagai landasan dalam pelaksanaan kegiatan MDRR DPR RI.
2. Membangun jaringan dan relasi dengan sesama mahasiswa, staf, dan anggota Komisi IX DPR RI.
3. Melakukan evaluasi terkait pengalaman magang, menilai pencapaian, hambatan yang dihadapi, dan pembelajaran yang diperoleh untuk pengembangan pribadi dan profesional.

### **5.2.2 Bagi Instansi Sekretariat Jenderal DPR RI**

1. Terdapat beberapa unit kerja yang dalam pelaksanaan Kuliah Umum dan Audiensi memberikan paparan materi berulang mengenai tugas dan fungsi DPR RI, sehingga penulis seringkali merasa menerima materi yang sama dan kurang mendalam terkait dengan isu spesifik yang menjadi pembahasan.
2. Adanya penetapan pembagian materi berupa kurikulum di setiap unit kerja yang spesifik serta pembahasan, review, dan *feedback* yang mendalam terkait dengan tugas yang telah diberikan kepada mahasiswa.
3. Mahasiswa lebih banyak dilibatkan secara langsung dalam kegiatan teknis dengan Tenaga Ahli Komisi IX DPR RI.

## DAFTAR PUSTAKA

- DPR RI. Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Diakses pada 1 Desember 2023 dari <https://www.dpr.go.id/akd/komisi>.
- Kemendikbud. (2020). Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Jakarta: Kemendikbud.
- Sekretariat Jenderal DPR RI. (2023). Buku Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Beserta Perubahannya.
- Dunn, R., & Griggs, S. A. (1988). Learning styles: Quiet revolution in American secondary schools. ERIC.
- Hidayat, F. (2020). Konsep Dasar Sistem Informasi Kesehatan. Deepublish.
- Pemerintah Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618). Pasal 1 ayat (1).
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV.
- Suwignjo, A. H. (2019). Tinjauan Hukum Pembukaan Rekam Medik Dari Sudut Pandang Asuransi Kesehatan. *Jurnal Spektrum Hukum*, 16(1), 1-36.
- Kampus Merdeka. Apa itu MBKM. Diakses pada 30 November 2023 dari <https://pusatinformasi.kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/hc/en-us/articles/16745055294361-Apa-itu-MBKM-Mandiri->.

LAMPIRAN

*Lampiran 1. Letter of Acceptance (LoA)*



**SEKRETARIAT JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270  
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor : 258/DL.01.04/08/2023  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penerimaan Mahasiswa Peserta Magang Program MSIB Kampus Merdeka

**LETTER OF ACCEPTANCE**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Dr. Ir. Indra Iskandar, M.Si.  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RI  
Nama Perusahaan/ Organisasi : Sekretariat Jenderal DPR RI

selaku penanggungjawab Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) Kampus Merdeka periode tahun 2023, dengan ini menyatakan bahwa nama-nama terlampir merupakan peserta program Magang di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RI dengan pelaksanaan pada 14 Agustus - 22 Desember 2023.

Demikian surat ini kami sampaikan sebagai kelengkapan syarat administrasi program MSIB periode tahun 2023 dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 22 Agustus 2023  
Sekretaris Jenderal,  
  
Dr. Ir. Indra Iskandar, M.Si.

## Daftar Nama Mahasiswa Peserta Magang Bersertifikat - Sekretariat Jenderal Dewan

## Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

No	ID Kegiatan	Nama Lengkap	NIK	Jenjang	PT Asal	Prodi	Posisi	Tipe Program	Durasi Program	Provinsi Domisili (Sesuai KTP)
1	7087644	Sabrina Tria Damayanti	3513145210020001	S1	Universitas Airlangga	Kesehatan Masyarakat	Assistant to MP's Expert Staff	Magang	14 Agustus 2023 - 31 Desember 2023	Prov. Jawa Timur
2	7096231	RONIA RIAWANTI	1219076910000001	S1	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	Hukum	Asisten Analis Pemantauan	Magang	14 Agustus 2023 - 31 Desember 2023	Prov. Sumatera Utara
3	7111447	ILMA NURLIANI RIZKY	3211025401020007	S1	Universitas Pendidikan Indonesia	Teknologi Pendidikan	Asisten Pengembangan Teknologi Pembelajaran	Magang	14 Agustus 2023 - 31 Desember 2023	Prov. Jawa Barat
4	7126359	Faiz Tamara Ramadhani	3271055011030003	S1	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta	Ilmu Hubungan Internasional	Analisis Kebijakan Luar Negeri	Magang	14 Agustus 2023 - 31 Desember 2023	Prov. Jawa Barat
5	7127387	Iasha Aya Farhana	3276055906030005	S1	Universitas Brawijaya	Ilmu Hukum	Assistant to MP's Expert Staff	Magang	14 Agustus 2023 - 31 Desember 2023	Prov. Jawa Barat
6	7131581	REYHAN ARYA HERMAWAN	3603192007020001	S1	Universitas Multimedia Nusantara Jakarta	Sistem Informasi	IT Data Engineer	Magang	14 Agustus 2023 - 31 Desember 2023	Prov. Banten
7	7145152	Faustina Sari Kurniawan	6303025003020008	S1	Universitas Prasetiya Mulya	Matematika	IT Data Analyst	Magang	14 Agustus 2023 - 31 Desember 2023	Prov. Kalimantan Selatan
8	6298130	T. ALIEF RIZKY BAYHAQI	3275081206020032	S1	Universitas Pancasila	Ilmu Hukum	Asisten Analis Sumber Daya Manusia Aparatur	Magang	14 Agustus 2023 - 31 Desember 2023	Prov. Jawa Barat

**Lampiran 2. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan MDRR DPR RI**



Gambar 1. *Building Learning Commitment* oleh Pusbangkom Legislatif



Gambar 2. Pembukaan Program MSIB Kampus Merdeka DPR RI



Gambar 3. Audiensi Komisi IX DPR RI



Gambar 4. Audiensi Komisi X DPR RI



Gambar 5. Audiensi Komisi IX dengan Dinas Kab. Kupang



Gambar 6. Kuliah Umum dengan Pusbangkom Legislatif





Gambar 7. Kuliah Umum BKSAP DPR RI



Gambar 8. Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX ke Kota Depok



Gambar 10. Simulasi Rapat Kerja RUU KUHP MDRR DPR RI



Gambar 11. Simulasi Sidang Paripurna MDRR DPR RI

**Lampiran 3. Sertifikat MSIB MDRR DPR RI**



Gambar 1. Sertifikat MSIB MDRR DPR RI